



---

## EFEKTIVITAS ASAS PACTA SUNT SERVANDA SAAT TERJADI KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) DALAM HUKUM PERJANJIAN INDONESIA

**Farhan Jiddan Saros**

Universitas Trunojoyo Madura

[farhanjiddansaros@gmail.com](mailto:farhanjiddansaros@gmail.com)

**Nurkholis Anwar**

Universitas Trunojoyo Madura

[nurkholisanwar26@gmail.com](mailto:nurkholisanwar26@gmail.com)

Alamat : Jalan Raya Telang, PO BOX 02 Kecamatan Kamal, Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi: [farhanjiddansaros@gmail.com](mailto:farhanjiddansaros@gmail.com)

**Abstract.** *The effectiveness of the Pacta Sunt Servanda principle in Indonesian treaty law becomes an important subject when force majeure occurs. This principle implies the obligation of parties to comply with the agreed contents of the agreement. However, when events beyond control, such as natural disasters, war, or other unexpected events (force majeure), this principle becomes tested. In this context, the effectiveness of the Pacta Sunt Servanda principle in Indonesian treaty law requires a balance between adherence to the agreed agreement and recognition of unforeseen circumstances that may affect its implementation. Awareness of the legal implications of force majeure is very important for the parties involved in the agreement, to maintain clarity, fairness and order in the implementation of the agreement amid the dynamics of unforeseen circumstances. The Pacta Sunt Servanda principle in Indonesian treaty law is intended to provide equal rights for all parties involved in a contract. However, in force majeure conditions, this principle may not apply due to circumstances that prevent contract compliance. By using a normative juridical approach, this research aims to evaluate the effectiveness of the Pacta Sunt Servanda principle in force majeure. The results of this study show that force majeure is one of the factors that affect the effectiveness of the Pacta Sunt Servanda principle in Indonesian treaty law. Therefore, the application of the Pacta Sunt Servanda principle can be delayed due to force majeure. The consequences are the loss of rights and obligations of the agreement and the non-fulfillment of the rights and obligations stipulated in the contract.*

**Keywords:** *Pacta Sunt Servanda, Force Majeure, Indonesian Agreement Law*

**Abstrak.** Efektivitas asas *Pacta Sunt Servanda* dalam hukum perjanjian Indonesia menjadi subjek penting ketika keadaan memaksa, seperti *force majeure*, terjadi. Asas ini menyiratkan kewajiban pihak untuk mematuhi isi perjanjian yang telah disepakati. Namun, ketika kejadian diluar kendali, seperti bencana alam, perang, atau peristiwa tak terduga lainnya (*force majeure*), asas ini menjadi teruji. Dalam konteks ini, efektivitas asas *Pacta Sunt*

Received Agustus 30, 2023; Revised September 2, 2023; Oktober 23, 2023

\* Farhan Jiddan Saros, [farhanjiddansaros@gmail.com](mailto:farhanjiddansaros@gmail.com)

*Servanda* dalam hukum perjanjian Indonesia memerlukan keseimbangan antara kepatuhan pada perjanjian yang telah disepakati dan pengakuan akan keadaan tak terduga yang bisa mempengaruhi pelaksanaannya. Kesadaran akan implikasi hukum *force majeure* sangat penting bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian, untuk menjaga kejelasan, keadilan, dan ketertiban dalam pelaksanaan perjanjian di tengah dinamika keadaan yang tidak terduga. Dalam asas *Pacta Sunt Servanda* dalam hukum perjanjian Indonesia dimaksudkan untuk memberikan kesetaraan hak bagi semua pihak yang terlibat dalam sebuah kontrak. Namun dalam kondisi *force majeure*, asas ini mungkin tidak berlaku karena adanya keadaan yang menghalangi kepatuhan kontrak. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas asas *Pacta Sunt Servanda* dalam keadaan memaksa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *force majeure* merupakan salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas asas *Pacta Sunt Servanda* dalam hukum perjanjian Indonesia. Oleh karena itu, penerapan asas *Pacta Sunt Servanda* dapat mengalami penundaan karena adanya keadaan memaksa. Adapun konsekuensinya adalah hilangnya hak dan kewajiban perjanjian dan tidak terpenuhinya hak-hak dan kewajiban yang diatur dalam kontrak.

**Kata kunci :** *Pacta Sunt Servanda, Force Majeure, Hukum Perjanjian Indonesia*

## PENDAHULUAN

Efektivitas asas *Pacta Sunt Servanda*, yang secara harfiah berarti "perjanjian harus dipatuhi," menjadi salah satu pilar utama dalam hukum perjanjian di Indonesia. Asas ini menegaskan bahwa pihak yang terlibat dalam sebuah perjanjian memiliki kewajiban moral dan hukum untuk mematuhi isi kesepakatan yang telah mereka buat. Namun, dalam konteks keadaan yang tidak terduga atau *force majeure*, yang meliputi peristiwa-peristiwa di luar kendali manusia seperti bencana alam, perang, atau kejadian tak terduga lainnya, pertanyaan tentang efektivitas asas *Pacta Sunt Servanda* menjadi kompleks.

Hukum perjanjian Indonesia mengakui keberadaan *force majeure* sebagai suatu keadaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian. Dalam situasi *force majeure*, pihak yang terlibat dalam perjanjian sering kali berhadapan dengan kesulitan dalam memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati. Hal ini memunculkan pertanyaan penting tentang sejauh mana asas *Pacta Sunt Servanda* tetap efektif dalam kondisi yang di luar kendali pihak-pihak yang berkontrak.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> SIMBOLON, G. (2022). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PANDEMI COVID-19 SEBAGAI DASAR FORCE MAJEURE DALAM PERJANJIAN KERJASAMA OPERASIONAL (STUDI KASUS PT. CAHAYA DUA DELAPAN DENGAN RSUD PADANG SIDEMPUAN).

Dalam mengevaluasi efektivitas asas *Pacta Sunt Servanda* saat *force majeure* terjadi dalam hukum perjanjian Indonesia, aspek legal dan moral harus dipertimbangkan secara cermat. Perlindungan terhadap hak-hak dan kewajiban pihak yang terlibat dalam perjanjian harus sejalan dengan pengakuan akan keadaan yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk memenuhi kesepakatan tersebut. Penegakan asas *Pacta Sunt Servanda* sekaligus harus mempertimbangkan keadilan di antara pihak-pihak yang terlibat, terutama dalam situasi di mana kepatuhan pada perjanjian menjadi tidak mungkin atau sangat sulit dilaksanakan karena *force majeure*.

Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana asas *Pacta Sunt Servanda* berinteraksi dengan situasi *force majeure* menjadi sangat penting dalam konteks hukum perjanjian Indonesia. Kesadaran akan batasan dan implikasi hukum dari kedua konsep ini diperlukan untuk memastikan penegakan hukum yang adil, berimbang, dan sesuai dengan konteks dinamika serta tantangan yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian di tengah-tengah kondisi yang tidak terduga.

## **METODE**

Metode studi pustaka adalah suatu pendekatan yang mendalam dalam pengumpulan informasi dan analisis yang berkaitan dengan topik tertentu dari berbagai sumber literatur yang relevan. Dalam konteks efektivitas asas *Pacta Sunt Servanda* saat terjadi *force majeure* dalam hukum perjanjian Indonesia, pendekatan ini melibatkan tahapan identifikasi topik dan tujuan studi yang berkaitan dengan efektivitas asas *Pacta Sunt Servanda* saat *force majeure* dalam konteks hukum perjanjian Indonesia. Pengumpulan sumber pustaka, seleksi dan penelaahan sumber pustaka, pengorganisasian informasi, analisis dan interpretasi data, penulisan dan penyajian

Metode studi pustaka memungkinkan peneliti atau pengkaji untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang topik yang diteliti, dengan memanfaatkan informasi dari berbagai sumber yang relevan dan terpercaya. Dalam konteks hukum perjanjian Indonesia, penggunaan metode ini dapat memberikan wawasan yang luas tentang bagaimana asas *Pacta*

*Sunt Servanda* diterapkan dan ditafsirkan dalam situasi *force majeure* serta dampaknya terhadap pelaksanaan perjanjian di Indonesia.<sup>2</sup>

## **PEMBAHASAN**

Efektivitas asas *Pacta Sunt Servanda*, yang mengatur bahwa perjanjian harus dipatuhi, memiliki signifikansi yang tinggi dalam hukum perjanjian di Indonesia. Namun, ketika terjadi keadaan memaksa atau *force majeure*, yang mencakup peristiwa-peristiwa di luar kendali manusia seperti bencana alam, perang, atau kejadian tak terduga lainnya, pertanyaan muncul tentang sejauh mana asas ini dapat diterapkan dan efektif dalam konteks hukum perjanjian Indonesia.

Dalam hukum perjanjian Indonesia, *force majeure* diakui sebagai pengecualian dari kewajiban pelaksanaan perjanjian. Ketika keadaan memaksa terjadi, pihak yang terlibat dalam perjanjian sering kali tidak mampu memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati. Hal ini menyebabkan pertentangan antara prinsip *Pacta Sunt Servanda* yang menekankan pada kepatuhan terhadap perjanjian dan keadaan yang melampaui kendali manusia yang menghambat pelaksanaannya.

Penerapan efektifitas asas *Pacta Sunt Servanda* dalam situasi *force majeure* memerlukan penafsiran hukum yang cermat. Pengadilan di Indonesia cenderung mempertimbangkan sejumlah faktor untuk menilai apakah *force majeure* membebaskan pihak dari kewajiban perjanjian, seperti apakah kejadian tersebut tak terduga, apakah dapat diantisipasi, dan apakah memungkinkan bagi pihak yang terlibat untuk tetap memenuhi kewajibannya meskipun dalam kondisi yang sulit.

Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan langkah-langkah yang diambil oleh pihak yang terkena dampak *force majeure* untuk meminimalkan kerugian dan tetap

---

<sup>2</sup> Bhakti, R. T. A. (2022). REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR DAN DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT AKIBAT KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) BERBASIS NILAI KEADILAN (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG).

memenuhi sebagian kewajiban yang memungkinkan. Kesadaran akan peranan ini penting dalam menilai efektivitas asas *Pacta Sunt Servanda* dalam hukum perjanjian Indonesia.<sup>3</sup>

Ketika menghadapi situasi *force majeure*, kejelasan kontrak dan klausul *force majeure* yang baik dapat membantu mengurangi konflik antara para pihak dan memandu proses penyelesaian sengketa dengan lebih baik. Pengaturan yang jelas dan rinci mengenai *force majeure* dalam kontrak dapat membantu dalam menentukan batasan-batasan serta kewajiban-kewajiban pihak di masa keadaan yang tak terduga.<sup>4</sup>

Dalam kesimpulannya, efektivitas asas *Pacta Sunt Servanda* saat terjadi *force majeure* dalam hukum perjanjian Indonesia merupakan keseimbangan rumit antara kepatuhan terhadap perjanjian yang disepakati dan pengakuan akan keadaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaannya. Penerapan asas ini memerlukan pertimbangan yang teliti terhadap faktor-faktor hukum, moral, dan praktis, serta kesadaran akan keterbatasan-keterbatasan yang terkait dengan situasi *force majeure* untuk menjaga keseimbangan dan keadilan antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian.

## KESIMPULAN

Dalam konteks hukum perjanjian Indonesia, efektivitas asas *Pacta Sunt Servanda* saat terjadi keadaan memaksa atau *force majeure* merupakan perbincangan yang kompleks. Asas ini menegaskan kewajiban untuk mematuhi isi perjanjian yang telah disepakati, namun keberadaan keadaan yang di luar kendali manusia menjadi faktor krusial yang mempengaruhi pelaksanaannya. Pembahasan ini menyoroti pertentangan antara prinsip kepatuhan terhadap perjanjian dengan kenyataan bahwa dalam situasi *force majeure*, kewajiban pelaksanaan perjanjian dapat terhambat.

---

<sup>3</sup> Helianny, I., & Manurung, E. H. (2021, February). Pengaruh Pandemic Covid-19 Terhadap Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Sistem Kontrak Kontruksi Di Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ* (Vol. 1, No. 1).

<sup>4</sup> Armandhanto, T., & Yovita Arie, M. (2021). Paradigma Prinsip Hardship Dalam Hukum Perjanjian Pasca Era New Normal di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 4(1), 50-60.

Penafsiran hukum yang cermat terhadap asas *Pacta Sunt Servanda* saat *force majeure* terjadi menjadi kunci dalam penegakan keadilan. Pengadilan di Indonesia cenderung mempertimbangkan sejumlah faktor untuk menilai apakah *force majeure* membebaskan pihak dari kewajiban perjanjian, termasuk keterkaitannya dengan ketidakdugaan, ketidakmampuan untuk diantisipasi, dan kemampuan pihak untuk memenuhi kewajiban meskipun dalam kondisi sulit.

Langkah-langkah yang diambil oleh pihak yang terdampak *force majeure* untuk memitigasi kerugian dan tetap memenuhi sebagian kewajiban juga menjadi penting dalam menilai efektivitas asas *Pacta Sunt Servanda*. Kesadaran akan perlunya penyebaran risiko dan upaya pihak yang terlibat untuk meminimalkan kerugian mencerminkan kerelaan untuk tetap menjaga esensi perjanjian, meskipun dalam situasi yang sulit.<sup>5</sup>

Pentingnya klausul *force majeure* yang jelas dalam kontrak menjadi faktor penentu dalam menentukan batasan dan kewajiban para pihak saat terjadi *force majeure*. Klarifikasi yang tepat tentang apa yang dianggap sebagai keadaan tak terduga dan bagaimana kontrak akan diterapkan dalam situasi tersebut dapat membantu mengurangi potensi konflik di kemudian hari.

Kesimpulan pada buku hukum perjanjian Indonesia, efektivitas asas *Pacta Sunt Servanda* saat terjadi *force majeure* memerlukan keseimbangan yang cermat antara kepatuhan pada perjanjian yang disepakati dan pengakuan terhadap keadaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaannya. Penafsiran yang bijaksana, pemahaman akan keterbatasan situasi *force majeure*, serta upaya pihak-pihak yang terlibat untuk meminimalkan kerugian dan memenuhi sebagian kewajiban, menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan hukum yang adil dan seimbang di dalam dunia perjanjian.

---

<sup>5</sup> Ramadhani, A. P., Njatrijani, R., & Musyafah, A. A. (2022). IMBAS COVID-19 DI SEKTOR ANGKUTAN DARAT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. 41 TAHUN 2020. *Diponegoro Law Journal*, 11(2).

## DAFTAR PUSTAKA

- Armandhanto, T., & Yovita Arie, M. (2021). Paradigma Prinsip Hardship Dalam Hukum Perjanjian Pasca Era New Normal di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 4(1), 50-60.
- Armandhanto, T. (2021). *Implikasi Hukum Penetapan Status Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) sebagai Bencana Nasional Terhadap Pelaksanaan Perjanjian* (Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya).
- Bhakti, R. T. A. (2022). *REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR DAN DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT AKIBAT KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) BERBASIS NILAI KEADILAN* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG).
- Heliany, I., & Manurung, E. H. (2021, February). Pengaruh Pandemic Covid-19 Terhadap Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Sistem Kontrak Kontruksi Di Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ* (Vol. 1, No. 1).
- Ramadhani, A. P., Njatrijani, R., & Musyafah, A. A. (2022). IMBAS COVID-19 DI SEKTOR ANGKUTAN DARAT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. 41 TAHUN 2020. *Diponegoro Law Journal*, 11(2).
- SIMBOLON, G. (2022). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PANDEMI COVID-19 SEBAGAI DASAR FORCE MAJEURE DALAM PERJANJIAN KERJASAMA OPERASIONAL (STUDI KASUS PT. CAHAYA DUA DELAPAN DENGAN RSUD PADANG SIDEMPUAN).